

OPTIMALISASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA 'MAKMUR' DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DESA JETAK

Anung Satria Priambudi^{1(a)}, Ananta Prathama^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
^{a)}anungsatriap@gmail.com, ^{b)}prathama.ananta@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

08-08-2023

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Tata Kelola, BUMDesa,
Pariwisata

Keywords:

Governance, BUMDesa,
Tourism

Corresponding Author:

prathama.ananta@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.822>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Makmur" dalam mengelola sektor pariwisata di Desa Jetak. Tata kelola BUMDesa yang efektif memerlukan berbagai upaya untuk memastikan pengelolaan pariwisata yang baik, serta menyediakan solusi jika muncul permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis, berdasarkan teori Purnomo, menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pariwisata oleh BUMDesa "Makmur" masih menghadapi beberapa kendala, terutama karena indikator tata kelola BUMDesa belum sepenuhnya diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian berkala untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata oleh BUMDesa.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the governance of the village-owned enterprise (BUMDesa) "Makmur" in managing the tourism sector in Jetak Village. Effective BUMDesa governance requires various efforts to ensure good tourism management and provide solutions if problems arise. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collected came from primary and secondary sources, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Based on Purnomo's theory, the analysis results show that the management of the tourism sector by BUMDesa "Makmur" still faces several obstacles, mainly because the BUMDesa governance indicators have not been fully implemented. Therefore, BUMDesa needs periodic assessments to optimize tourism management.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia dapat terbangun atas dasar pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat sepenuhnya, pembangunan nasional dapat menjadi kehendak masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pembangunan nasional dapat berkelanjutan apabila seluruh kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang nyata. Menurut Sa'dullah (2016), desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar dalam menciptakan stabilitas negara. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sidik (2015) bahwa desa merupakan tempat yang strategis untuk merencanakan dan melaksanakan tujuan pembangunan negara, karena desa merupakan dasar untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat.

Pengelolaan BUMDesa dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa, cara kerja BUMDesa dengan menjadikan kegiatan ekonomi dalam bentuk kelembagaan atau dikelola secara profesional, namun tetap menjaga potensi asli desa agar masyarakat dapat berusaha lebih produktif, efektif, dan efisien, peran BUMDesa akan berfungsi sebagai landasan kemandirian bangsa dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun daftar indikator perkembangan BUMDesa di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Indikator Perkembangan BUMDesa di Kabupaten Pacitan

No	Indikator Perkembangan	Jumlah BUMDesa
1	Pemula	71
2	Berkembang	22
3	Maju	22
Total		115

Sumber : Data Desa Center Provinsi Jawa Timur, diolah penulis (2022)

Desa Jetak merupakan salah satu desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, untuk memanfaatkan potensi desa Jetak BUMDesa "Makmur" didirikan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMDesa "Makmur" berdiri sejak tahun 2017 hingga saat ini. BUMDesa "Makmur" memiliki empat unit usaha antara lain unit usaha pasar, unit usaha penyewaan alat-alat pesta, unit usaha simpan pinjam dan unit wisata yang mengelola dan mengembangkan tiga wisata diantaranya; pantai Pidakan, pantai Watubale dan pantai Mbenges. Dengan pengelolaan sektor pariwisata yang baik, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan akan tercapai kesejahteraan. Selain itu bisa menjadi pusat perekonomian provinsi Jawa Timur bagian selatan. BUMDesa "Makmur" dalam pengelolaan pariwisata; pantai Pidakan, pantai Watubale dan pantai Mbenges. Setiap wisata pantai tersebut memiliki kelompok sadar wisata atau biasa disebut Pokdarwis, namun kegiatan Pokdarwis sendiri lebih berorientasi pada pengelolaan dan pengembangan wisata.

Tata kelola adalah suatu proses yang dilaksanakan dalam suatu organisasi, yang kemudian dijadikan prinsip pelaksanaan dalam kegiatan organisasi tersebut. Menurut (Siew Yee et al., 2018), prinsip tata kelola yang baik dan penerapan aturan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa penting untuk dipahami oleh pengurus dan masyarakat. enam prinsip tata kelola BUMDesa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel (Purnomo, 2016). Ada dua kekuatan yang saling mendukung yaitu antara pemerintah yang berkomitmen, warga yang aktif juga pemerintah yang selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini BUMDesa "Makmur" mendapat dukungan dari perangkat desa Jetak, mendukung setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa. Tanpa dukungan penuh dari perangkat desa, BUMDesa tidak dapat berfungsi secara optimal. BUMDesa bekerjasama dengan masyarakat desa Jetak. Selain bekerja sama dengan masyarakat desa, BUMDesa "Makmur" juga bekerja sama dengan pedagang UMKM dan bekerja sama dengan perusahaan swasta yaitu Astra. Juga Pokdarwis yang membantu dalam pengelolaan pariwisata.

Tata kelola yang baik diperlukan untuk membimbing dan mengatur hubungan antara pemerintah desa, BUMDesa, masyarakat desa dan semua pihak yang bekerjasama, agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik,

maka harus diterapkan dalam semua kegiatan BUMDesa, unit usaha BUMDesa dibangun dan dikembangkan secara bertahap dengan cara pembentukan BUMDesa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa, juga sebagai pembangunan ekonomi tingkat desa. BUMDesa dibentuk berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan potensi desa, dan BUMDesa dibentuk untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan BUMDesa harus dikelola secara mandiri dan profesional, dan diperlukan tata kelola yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan BUMDesa.

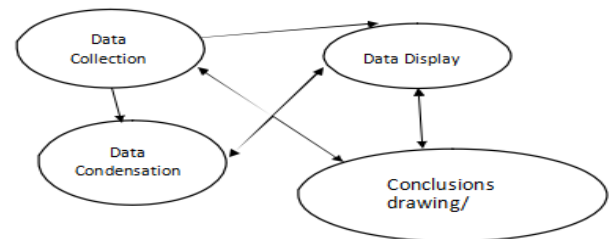
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik untuk mencari, memperoleh, menyimpulkan dan mencatat informasi baik berupa data primer maupun data sekunder, yang digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah dan menganalisis faktor-faktor yang benar berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian didasarkan pada pembuktian kebenaran dan pemecahan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan objek yang alamiah. Proses penelitian kualitatif diinvestasikan pada hal-hal penting seperti mengajukan pertanyaan, prosedur dan mengumpulkan data tertentu dari para partisipan, serta menganalisis suatu isu bahkan hal-hal tertentu yang kemudian bahan tersebut diinterpretasikan. Adapun menurut Ahmad. J, (2015), Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, dalam hal ini informan yang dimaksud meliputi kepala desa, ketua BUMDesa, ketua pokdarwis pidakan, ketua pokdarwis watubale, ketua pokdarwis mbeges, dan pedagang. Data sekunder adalah sumber data tidak langsung atau data pendukung yang melengkapi data primer dari sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang memiliki dimensi strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data. (Sugiyono, 2019: 297) mengatakan ada empat teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu melalui observasi, wawancara,

dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019: 320), dimana analisis data kualitatif dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)

Sumber: Sugiyono (2019)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa informasi yang diperoleh di lapangan tidak dibuktikan dengan angka-angka, tetapi berisi uraian yang menggambarkan hasil sesuai dengan data yang dianalisis dan kemudian diinterpretasikan. Berdasarkan teori dan observasi yang diperoleh selama penelitian, maka dapat dideskripsikan permasalahan yang dihadapi, kemudian dicari kesimpulan dan solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kooperatif

Sebagaimana pada prinsip kooperatif, bahwa BUMDesa "Makmur" telah berkerjasama dengan pemerintah desa, pihak swasta, Pokdarwis dan masyarakat. BUMDesa bekerja sama dengan Astra sebagai pihak swasta dengan tujuan untuk mengembangkan usaha BUMDesa, adapun dibangunnya pendopo Astra di unit wisata Pidakan. Sehubungan dengan kerjasama dengan masyarakat desa Jetak dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, masyarakat akan direkrut menjadi pegawai pada unit wisata BUMDesa sebagai bagian dari Pokdarwis. Hal ini merupakan bagian dari upaya BUMDesa untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sedangkan tugas Pokdarwis antara lain menjaga kebersihan dan keamanan serta mempromosikan wisata Pidakan, Watubale dan Mbeges yang dikelola oleh BUMDesa. Oleh karena itu, pemerintah desa menetapkan regulasi pariwisata desa dengan tujuan untuk

mengatur dan mengoptimalkan pariwisata yang dikelola oleh BUMDesa "Makmur".

Menurut Wibowo, Budi dkk (2022), tata kelola menawarkan banyak peluang dalam pengelolaan destinasi wisata. Implementasi pengelolaan di destinasi wisata dapat mendorong pengembangan pariwisata dan memperkuat kemitraan antara semua pemangku kepentingan dan pihak swasta. Oleh karena itu pihak swasta membutuhkan jasa BUMDesa untuk menunjang usahanya, kerjasama ini juga berdampak positif bagi masyarakat Jetak. Pemerintah desa akan menetapkan aturan sehingga dapat beroperasi dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan memenuhi keinginan pihak swasta dapat berjalan dengan baik, demikian juga dengan pelaksanaan pengelolaan pariwisata BUMDesa. Bentuk dukungan pihak swasta masih belum merata di antara unit usaha BUMDesa, khususnya di unit wisata Pidakan, Watubale dan Mbenges yang hanya diuntungkan unit wisata Pidakan dengan bangunan pendopo Astra. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan pada unit wisata Watubale dan Mbenges, dikarenakan sebagai prioritas utama pengembangan di unit wisata Pidakan. Dapat diketahui bahwa tata kelola BUMDesa "Makmur" dalam pengelolaan sektor pariwisata telah berjalan cukup baik, dilihat dari belum adanya kerjasama dengan BUMDesa lain dan dampak kerjasama pihak swasta baru dirasakan unit wisata Pidakan.

Partisipatif

Sebagaimana pada prinsip partisipatif, dimaknai adanya keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDesa "Makmur" yaitu pemerintah desa, Pokdarwis dan masyarakat Jetak, yang ikut serta dalam pengelolaan unit wisata Mbenges, Pidakan, Watubale yang dikelola BUMDesa. Dengan ini, pemerintah desa bersama BPD ikut serta membuat peraturan tentang pariwisata desa, dan masyarakat Jetak juga mendukung dengan melibatkan dalam pengelolaan pariwisata. Sebagaimana dikemukakan dalam pernyataan Priangani dalam Aeni (2020), pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sumber devisa dan salah satu sektor yang berperan sangat penting dalam pembangunan berbagai daerah, sehingga diharapkan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata dapat membantu pemerintah desa dan BUMDesa untuk

melaksanakan pembangunan desa melalui sektor pariwisata. Berdasarkan hal tersebut BUMDesa "Makmur" selama ini dapat berkembang dalam penyelenggaraan pariwisata karena adanya peran serta dari Pokdarwis, masyarakat dan pemerintah desa, terdapat faktor yang dapat menghambat perkembangan pariwisata karena tidak adanya dukungan dari pemerintahan desa dan masyarakat untuk pengembangan pariwisata BUMDesa. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi pemerintah desa dan Pokdarwis sangat diperlukan untuk keberlanjutan destinasi wisata.

Menurut Sunaryo dalam Matthoriq (2021), tujuan dan tugas pembangunan pariwisata dapat terwujud manakala proses pencapaiannya dilakukan melalui pengelolaan pariwisata yang baik. Oleh karena itu, pengelola Pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan kepariwisataan harus dapat berusaha semaksimal mungkin agar BUMDesa "Makmur" dapat maju dengan bekerjasama pemerintah desa, pokdarwis dan masyarakat melalui unit wisata Pidakan, Watubale dan Mbenges. Dengan kerjasama ini dapat memperkuat BUMDesa untuk terus berkembang. Oleh karena itu, masyarakat Jetak yang tergabung dalam Pokdarwis turut serta dalam menjaga kebersihan dan keamanan unit wisata BUMDesa serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan pertemuan BUMDesa. Juga, partisipasi pengurus desa dalam pembuatan peraturan pariwisata desa berdasarkan kesepakatan bersama antara BPD, BUMDesa dan masyarakat Jetak. Bahwa peran serta pemerintah desa dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata yang dikelola BUMDesa sangat penting bagi perkembangan dan keberhasilan BUMDesa "Makmur". Dengan demikian bahwa prinsip partisipatif pada BUMDesa "Makmur" dalam pengelolaan sektor pariwisata sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Sebagaimana keikutsertaan pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat yang saling mendukung.

Emansipatif

Sebagaimana pada prinsip emansipatif, terdapat adanya kesamaan HTM wisata dan harga menu makanan dan minuman, juga perlakuan yang sama bagi para pedagang yang berjualan di sekitar lokasi wisata. BUMDesa "Makmur" memperlakukan sama tanpa membedakan pokdarwis Pidakan, Watubale dan Mbenges. Bahkan para pengelola BUMDesa memberikan kebebasan untuk Pokdarwis dalam

pengembangan pariwisata Jetak. Para pedagang dari luar desa Jetak dipersilakan untuk berjualan disekitar lokasi wisata, dan tanpa membedakan antara pedagang laki-laki maupun perempuan, hal ini menunjukkan sikap yang adil dari pengelola BUMDesa terhadap pengelolaan pariwisata. Dengan begitu, setiap orang diperlakukan sama, tidak hanya golongan tertentu saja yang diprioritaskan. Menurut Kusdewan (2022) menyatakan bahwa pengurus BUMDesa dalam hal ini berperan untuk memfasilitasi karyawannya, karena dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan karyawan dapat berbanding lurus dengan meningkatnya kinerja dan profesionalitas. Dalam hal ini, BUMDesa "Makmur" tidak membedakan antara pimpinan Pokdarwis Pidakan, Watubale dan Mbenges dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di BUMDesa. Pokdarwis diperlakukan sama dalam hal pelatihan, sosialisasi bahkan aturan, dan SOP berlaku bagi Pokdarwis karena berada dalam satu wadah BUMDesa "Makmur". Persamaan tersebut juga berlaku untuk HTM wisata Pidakan, Watubale dan Mbenges, harga menu makanan dan minuman serta perlakuan yang adil terhadap pedagang yang berjualan di sekitar lokasi wisata tanpa memandang asalnya. Dapat diketahui bahwa prinsip emansipatif BUMDesa "Makmur" dalam pengelolaan sektor pariwisata telah dilaksanakan dengan sangat baik. Seperti yang terlihat dari persamaan HTM wisata, persamaan harga menu makanan dan minuman, perlakuan yang sama untuk pedagang asli Jetak dan luar, perlakuan yang sama BUMDesa untuk pengelola Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata dan terdapat dukungan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kebersihan pariwisata.

Transparan

Sebagaimana pada prinsip transparan, bahwasanya pemerintah desa bersama BUMDesa "Makmur" untuk unit wisata Pidakan, Watubale dan Mbenges dilakukan pemerataan pembangunan guna meningkatkan fasilitas dan perekonomian melalui pariwisata. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembangunan adalah dari hasil dana desa, sebagaimana tercantum dalam papan pembangunan desa yang dipasang di setiap unit wisata BUMDesa. Selain untuk pengembangan pariwisata, transparansi hasil pendapatan digunakan untuk mengkalkulasikan target awal

pendapatan yang sudah ditetapkan oleh BUMDesa "Makmur". Hal ini dapat memacu Pokdarwis Pidakan, Watubale dan Mbenges untuk secara rutin melaporkan hasil pendapatan pariwisata dan menyetorkan pendapatan tersebut setiap bulan kepada BUMDesa "Makmur". BUMDesa menerapkan transparansi dengan mengadakan musyawarah desa pada akhir tahun untuk melaporkan hasil pendapatan usaha kepada pengurus desa dan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pendapat (Maslika, 2021) menyatakan bahwa tujuan dari transparansi BUMDesa ini diharapkan untuk semua elemen masyarakat dengan mudah mengetahui informasi yang ada di dalam laporan keuangan, juga diharapkan dalam penyebaran informasi yang diperoleh dapat berguna untuk memonitor kegiatan yang dilakukan BUMDesa.

BUMDesa "Makmur" melaksanakan transparansi kepada masyarakat mengenai pendapatan BUMDesa, dimana transparansi dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, Pokdarwis, BUMDesa dan masyarakat. Transparansi sumber pendanaan pembangunan pariwisata juga ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan memasang papan informasi pembangunan pariwisata di setiap unit wisata BUMDesa dengan terdapat nominal anggaran dari dana desa. Dapat diketahui bahwa prinsip transparansi pada tata kelola BUMDesa "Makmur" dalam pengelolaan sektor pariwisata dapat dikategorikan baik.

Akuntabel

Sebagaimana pada prinsip akuntabel, bahwa BUMDesa "Makmur" sudah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dimana AD/ART ini telah disepakati bersama dalam musyawarah desa. Menunjukkan dari perspektif tanggung jawab bahwa semua kegiatan usaha harus dicatat, baik secara teknis maupun administratif. Hal ini dapat mencerminkan bahwa BUMDesa "Makmur" secara administratif sudah bertanggung jawab atas penggunaan AD/ART.

Menurut sudarmanto dalam (Quispe, 2023), pendirian badan hukum oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usahanya, memanfaatkan aset-aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan unit usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menjadikan BUMDesa "Makmur" berupaya

untuk mendaftarkan badan hukum untuk memperlancar aktivitas kegiatan didalam BUMDesa, agar memiliki legalitas yang berbadan hukum. bahwasanya prinsip akuntabel pada tata kelola BUMDesa "Makmur" sudah terlaksana dengan baik, sebagaimana BUMDesa telah memiliki AD/ART dan legalitas berbadan hukum.

Sustainabel

Sebagaimana pada prinsip sustainabel, dimana demi keberlanjutan destinasi wisata BUMDesa "Makmur" dalam pengelolaan sektor pariwisata maka diperlukan promosi kepada masyarakat luas dapat melalui banner, brousur, dan media sosial. Menurut Umami, (2015) media sosial adalah media online dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi informasi dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Media sosial digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi karena merespon pengguna dengan cepat, sehingga jangkauannya luas dan biayanya relatif murah. Itulah beberapa manfaat promosi melalui media sosial bagi BUMDesa, sehingga mewajibkan Pokdarwis memiliki media sosial sendiri untuk mempromosikan destinasi wisata dapat melalui platform Facebook, Youtube, dan Instagram. Pariwisata di promosikan oleh seluruh Pokdarwis Pidakan, Watubale dan Mbenges dibantu oleh pengelola BUMDesa. Promosi melalui media sosial banyak sekali manfaatnya, selain promosi wisata melalui media sosial BUMDesa "Makmur" dibantu oleh Pokdarwis juga mempromosikan melalui banner, brosur, dan tiket masuk wisata untuk mempromosikan pariwisatanya. Adapun keterbatasan pengelola Pokdarwis dalam memahami penggunaan media sosial. Hal ini dapat menghambat promosi pariwisata dikarenakan tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkopeten dibidangnya. bahwasanya prinsip sustainabel pada tata kelola BUMDesa "Makmur" dalam pengelolaan sektor pariwisata telah dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun minimnya pemahaman pengelola Pokdarwis untuk mempromosikan wisata melalui media sosial, akan tetapi hal ini tidak berpengaruh dan kegiatan promosi tetap berlanjut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan melalui wawancara secara mendalam tentang tata kelola BUMDesa

Makmur dalam mengelola sektor pariwisata desa Jetak. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan sektor pariwisata di desa jetak telah berjalan dengan baik namun masih memiliki beberapa aspek yang perlu untuk diperbaiki lebih lanjut.

Dari hasil enam indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dimana prinsip kooperatif sudah berjalan cukup baik dengan adanya kerjasama oleh pemerintah desa, pihak swasta, pokdarwis, dan masyarakat untuk mempertahankan usaha BUMDesa akan tetapi dampak kerjasama dengan pihak swasta baru dirasakan unit wisata pidakan. Prinsip partisipatif sudah terlaksana sangat baik, dengan keterlibatan pemerintah desa, pokdarwis dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang dikelola BUMDesa Makmur. Prinsip emansipatif sudah terlaksana dengan sangat baik, dimana terdapat kesamaan HTM wisata, harga menu makanan dan minuman, juga tanpa membedakan pedagang disekitar lokasi wisata. Prinsip transparan dilaksanakan dengan baik, dilihat adanya keterbukaan sumber dana pembangunan pariwisata, serta pokdarwis yang rutin melaporkan hasil penjualan tiket wisata kepada BUMDesa. Prinsip akuntabel terlaksana dengan baik, dimana BUMDesa sudah memiliki AD/ART dan legalitas badan hukum. Prinsip sustainabel terlaksana dengan cukup baik, guna mengembangkan dan mempertahankan pariwisata BUMDesa dibantu oleh pokdarwis melakukan promosi wisata melalui media sosial, tetapi terdapat kendala sebab minimnya keahlian pengelola pokdarwis dalam menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi (1)*. Gava Media.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. *Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33.
- Candera, M., Kosim, B., Herudiansyah, G., & Seprina. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Sosial Budaya Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.22236/syukur>

- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (IV)*. Pusataka Belajar.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik Peduli, inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Fridayanti, E.Y. (2022). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Maju Mandiri Sejahtera" Di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Herry Warsono, S., Rahmat, S., Danarti, Agustina Antinia, C., Rahmawati, E., Sukarno Daniarta, T., & Siregar, N. A. M. (2018). *Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)*.
- Kusdewanti, R. S & Bleberan, M. D., Playen, K., Gunungkidul, K., (2022). *Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sejahtera dalam Pemberdayaan Village-Owned Enterprises (BUMDES) "Sejahtera" in Empowerment of The Community of Bleberan Village, Playen District, Gunungkidul Regency*. 3(3), 408–421.
- Martini, N. N. P., & Yulinartati. (2022). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk Mewujudkan Desa Mandiri pada BUMDesa. Dana Asri Sejahtera Desa Wonosari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 3(2), 1-8
- Marsono, dkk. 2018. *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Sosial Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maslika, Sopanah, A., & Prawestri, H. P. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) tamanharjo bersinar kecamatan singosari kabupaten malang*. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 35, 174–190.
- Matthoriq, Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa "Bumiaji agrotourism" di Kota Batu*. *JIAP Vol 7, No 1, Pp 20-29, 2021*, 7(1), 20–29.
- Purnomo, J. (2016). *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)*. Infest Yogyakarta.
- Quispe, J. (2023). *Status Badan Hukum Sebagai Perseroan Perorangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1–12.
- Rahmat. (2020). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Sa'udullah, (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Pedesaan Agropoltian*.
- Sembiring, S. (2017). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. *Kertha Patrika*, 39(01), 16. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p02>
- Sidik, F. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N., & Abdullah, M. (2018). *Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era*. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/jai.190299>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.